

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 135.11.2.693095/2026

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

Revisi ke 01
Tanggal : 27 Desember 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
- 2. Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
- 3. Provinsi : (05) JAWA TIMUR
- 4. Kode>Nama Satker : (693095) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TIMUR
- Sebesar : Rp. 6.518.299.000 (ENAM MILIAR LIMA RATUS DELAPAN BELAS JUTA DUA RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	6.518.299.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN SURABAYA II (135) Rp. 6.518.299.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

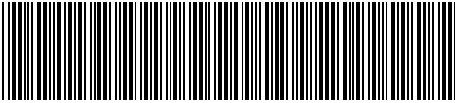
ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

LAMPIRAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2026

NOMOR : DIPA- 135.11.2.693095/2026

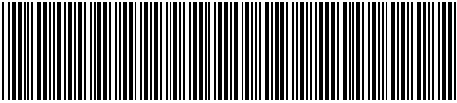


DS:0911-8177-9417-5840

Satker : (693095) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TIMUR

BB	Program Pembentukan Regulasi	Rp.	23.857.000
BB.7133	Penyelenggaraan Pembangunan Hukum Nasional dan Analisis dan Evaluasi Hukum di Wilayah	Rp.	23.857.000
BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.	6.494.442.000
BF.7136	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Rp.	6.494.442.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693095/2026
I A. INFORMASI KINERJA



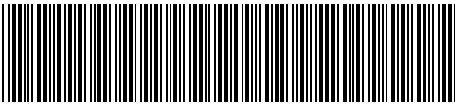
DS:0911-8177-9417-5840

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode>Nama Satker : (693095) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TIMUR

Halaman : I A. 1

Program	:	135.11.BB	Program Pembentukan Regulasi				23.857.000	
Kegiatan	:	7133	Penyelenggaraan Pembangunan Hukum Nasional dan Analisis dan Evaluasi Hukum di Wilayah				23.857.000	
Indikator Kinerja Kegiatan	:							
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7133.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM		1,00	Rekomendasi Kebijakan	23.857.000
Rincian Output	:	01	ABD.001	Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Hukum di Daerah		1.00	Rekomendasi Kebijakan	23.857.000
Program	:	135.11.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum				6.494.442.000	
Kegiatan	:	7136	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah				6.494.442.000	
Indikator Kinerja Kegiatan	:							
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7136.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		20,00	Lembaga	24.370.000
Rincian Output	:	01	BDB.001	Pengelolaan anggota JDIHN di wilayah		20.00	Lembaga	24.370.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	7136.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		300,00	Orang	38.198.000
Rincian Output	:	01	BDC.001	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat melalui Penyuluhan Hukum di Daerah		300.00	Orang	38.198.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	7136.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		91,00	Lembaga	24.636.000
Rincian Output	:	01	BIC.001	Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum di Daerah		91.00	Lembaga	24.636.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	7136.BMA	Data dan Informasi Publik		1,00	dokumen, Peta, Data	24.589.000
Rincian Output	:	01	BMA.001	Inventarisasi Permasalahan Hukum di Wilayah		1.00	Data	24.589.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693095/2026
I A. INFORMASI KINERJA



DS:0911-8177-9417-5840

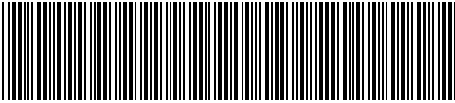
Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode>Nama Satker : (693095) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TIMUR

Klasifikasi Rincian Output	5	:	7136.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan		825,00	Orang	5.280.000.000
Rincian Output		:	01	QBA.U01	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi (PN)	825.00	Orang	5.280.000.000
Klasifikasi Rincian Output	6	:	7136.QBC	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat		117,00	Kelompok Masyarakat	998.712.000
Rincian Output		:	01	QBC.U01	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi (PN)	117.00	Kelompok Masyarakat	998.712.000
Klasifikasi Rincian Output	7	:	7136.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		1,00	Lembaga	103.937.000
Rincian Output		:	01	QDB.001	Layanan Pendampingan Pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan (PN)	1.00	Lembaga	103.937.000

Jakarta, 01 Desember 2025
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
MIN USIHEN
NIP. 196903091994032001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693095/2026
I B. SUMBER DANA



DS:0911-8177-9417-5840

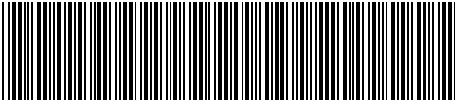
Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode>Nama Satker : (693095) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TIMUR

			Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2026	Rp.	6.518.299.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
1. Rupiah Murni	Rp.	6.518.299.000		(2) RPLN	US\$	0 Rp.
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0 Rp.
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693095/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN



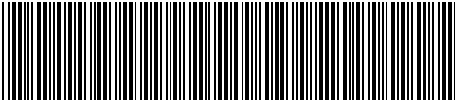
DS:0911-8177-9417-5840

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode>Nama Satker : (693095) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TIMUR
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
693095	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TIMUR	-	6.518.299	-	-	-	6.518.299	05 . 51	
135.11.BB	Program Pembentukan Regulasi	-	23.857	-	-	-	23.857		
7133	Penyelenggaraan Pembangunan Hukum Nasional dan Analisis dan Evaluasi Hukum di Wilayah	-	23.857	-	-	-	23.857		
7133.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (05.51 JAWA TIMUR / KOTA SURABAYA)	-	23.857	-	-	-	23.857		
01	RM	-	23.857	-	-	-	23.857		
135.11.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	6.494.442	-	-	-	6.494.442		
7136	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	-	6.494.442	-	-	-	6.494.442		
7136.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (05.51 JAWA TIMUR / KOTA SURABAYA)	-	24.370	-	-	-	24.370		
01	RM	-	24.370	-	-	-	24.370		
7136.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (05.51 JAWA TIMUR / KOTA SURABAYA)	-	38.198	-	-	-	38.198		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693095/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN

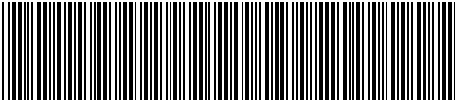


DS:0911-8177-9417-5840

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode>Nama Satker : (693095) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TIMUR
Kewenangan : (KD)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI	BARANG	MODAL	BANTUAN SOSIAL	LAIN-LAIN	JUMLAH SELURUH		
1	2	[51] 3	[52] 4	[53] 5	[57] 6	[58] 7	8	9	10
01 RM		-	38.198	-	-	-	38.198	135	
7136.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (05.51 JAWA TIMUR / KOTA SURABAYA)	-	24.636	-	-	-	24.636	05 . 51	
01 RM		-	24.636	-	-	-	24.636	135	
7136.BMA	Data dan Informasi Publik (05.51 JAWA TIMUR / KOTA SURABAYA)	-	24.589	-	-	-	24.589	05 . 51	
01 RM		-	24.589	-	-	-	24.589	135	
7136.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan (05.51 JAWA TIMUR / KOTA SURABAYA)	-	5.280.000	-	-	-	5.280.000	05 . 51	
01 RM		-	5.280.000	-	-	-	5.280.000	135	
7136.QBC	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat (05.51 JAWA TIMUR / KOTA SURABAYA)	-	998.712	-	-	-	998.712	05 . 51	
01 RM		-	998.712	-	-	-	998.712	135	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693095/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:0911-8177-9417-5840

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode>Nama Satker : (693095) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TIMUR
Kewenangan : (KD)

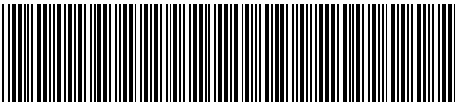
Halaman : II. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7136.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (05.51 JAWA TIMUR / KOTA SURABAYA)	-	103.937	-	-	-	103.937	05 . 51	
	01 RM	-	103.937	-	-	-	103.937	135	
JUMLAH		-	6.518.299	-	-	-	6.518.299		

Jakarta, 01 Desember 2025
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
MIN USIHEN
NIP. 196903091994032001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693095/2026
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:0911-8177-9417-5840

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode>Nama Satker : (693095) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TIMUR

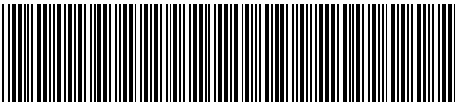
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	693095	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TIMUR													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	809.992	320.217	224.162	8.653	7.269	7.269	7.269	3.911	0	0	5.129.557	6.518.299
	135.11.BB.7133	BELANJA BARANG	0	809.992	320.217	224.162	8.653	7.269	7.269	7.269	3.911	0	0	5.129.557	6.518.299
		Penyelenggaraan Pembangunan Hukum Nasional dan Analisis dan Evaluasi Hukum di Wilayah	0	0	0	1.250	2.083	2.083	2.083	2.083	1.120	0	0	13.157	23.857
	135.11.BF.7136	52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	1.250	2.083	2.083	2.083	2.083	1.120	0	0	13.157	23.857
		Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	0	809.992	320.217	222.912	6.570	5.187	5.187	5.187	2.791	0	0	5.116.400	6.494.442
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	809.992	320.217	222.912	6.570	5.187	5.187	5.187	2.791	0	0	5.116.400	6.494.442

Jakarta, 01 Desember 2025
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
MIN USIHEN
NIP. 196903091994032001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693095/2026
IV A. B L O K I R



DS:0911-8177-9417-5840

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [11] BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : [05] JAWA TIMUR
Kode dan Nama Satker : [693095] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TIMUR

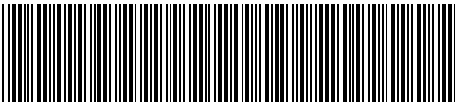
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
MIN USIHEN
NIP. 196903091994032001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693095/2026
IV B. C A T A T A N



DS:0911-8177-9417-5840

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [11] BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : [05] JAWA TIMUR
Kode dan Nama Satker : [693095] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TIMUR

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
MIN USIHEN
NIP. 196903091994032001